



DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DONGGALA

Khaliq

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Email: khaliqkoslet46@gmail.com

Asrifai

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Email: asrifai@untad.ac.id

Syamsul Bahri

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Email: sy2msul@gmail.com

Alamat Kampus: Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu,
Sulawesi Tengah 94148

ABSTRAK

Kollaboratif Government menjadi tema kunci dalam proses bantuan bencana yang terjadi di Donggala pada 28 September 2018, konsep dinamis kollaboratif Government yang diusulkan oleh Emerson, Nabach, dan Balogh, yang terdiri dari prinsip-prinsip umum, motif bersama, dan memobilisasi kapasitas untuk bertindak bersama, merupakan hal yang penting ketika mempertimbangkan proses tanggap darurat Gempa dan Tsunami, investigasi menyeluruh dengan prosedur ketat berhasil menelusuri dinamika kolaboratif government dalam tanggap darurat bencana pascagempa dan tsunami di kabupaten Donggala, serta kolaborasi lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam penanganan gempa dan tsunami, hasil penelitian memperlihatkan bahwa, pada *penggerakan prinsip Bersama* menunjukkan aspek kemanusiaan menjadi penentu keterlibatan segenap komponen dalam penanganan bencana, atas dasar kemanusiaan itu juga mereka bergerak tidak menunggu lama setelah bencana terjadi secara bersamaan BPBD Donggala sebagai pemegang tanggungjawab dalam menanggulangi bencana membuka ruang kerjasama yang kuat dalam penanganan bencana, *Motivasi Bersama*, kolaborasi yang kuat antar segenap pemangku kepentingan dijadikan sebagai penyangga untuk memastikan semua masalah terselesaikan dengan baik, karena begitu banyaknya urusan mendesak yang harus diselesaikan ditambah lagi dengan luasnya cakupan wilayah terdampak menjadi alasan pentingnya kolaborasi yang kuat dihadirkan dalam penanganan bencana, satu hal yang mengembirakan pasalnya begitu banyak komponen yang tergerak untuk ikut serta dalam penangan bencana atas dasar nilai kemanusiaan menjadikan bencana menjadi urusan bersama, kolaborasi terbangun melalui hubungan interpersonal individu maupun kelompok. *Kapasitas melakukan tindakan bersama*, aspek financial yang dimiliki segenap pemangku kepentingan mendorong terbentuknya kolaborasi yang kuat dalam menangani tanggap darurat gempa bumi dan tsunami di Donggala, hubungan interpersonal antar individu atau kelompok dalam menggali pengetahuan menjadikan proses pendistribusian bantuan yang sifatnya cepat dan tepat sampai kepada para

penerima manfaat, Temuan pada collaborative governance jelas, tapi ada satu hal yang penting, yang menjadi sorotan adalah kurangnya ketersediaan, dokumen Perencanaan Darurat Gempa Bumi dan Tsunami, meskipun seharusnya disampaikan sebagai rencana kerja sama awal sebelum bencana terjadi, namun kondisi yang ada tetap mampu menghasilkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam tanggap darurat pasca bencana.

Kata Kunci: Penggerakan Prinsip, Motivasi, Kapasitas Melakukan Tindak Bersama

ABSTRACT

Collaborative Governance emerged as a key theme in the disaster relief efforts following the Donggala earthquake on September 28, 2018. The dynamic concept of Collaborative Governance proposed by Emerson, Nabatchi, and Balogh, comprising general principles, shared motivation, and mobilizing capacity for joint action, proved crucial when considering the emergency response process to the Earthquake and Tsunami. A thorough investigation employing strict procedures successfully traced the dynamics of collaborative governance in the post-earthquake and tsunami disaster emergency response in Donggala Regency, as well as the collaboration between non-governmental organizations and the private sector in managing the earthquake and tsunami.

Research findings reveal that, regarding the mobilization of principles, the humanitarian aspect was a decisive factor in the involvement of all components in disaster management. It was on this humanitarian basis that they acted swiftly after the disaster, with BPBD Donggala, as the authority responsible for disaster mitigation, opening strong avenues for cooperation in disaster management. Shared Motivation: The strong collaboration among all stakeholders served as a pillar to ensure all issues were resolved effectively, given the multitude of urgent matters and the vast affected area, underscoring the importance of robust collaboration in disaster management. Encouragingly, numerous components were moved to participate in disaster relief based on humanitarian values, making the disaster a shared concern. Collaboration was built through interpersonal relationships among individuals and groups. Capacity for Joint Action: The financial resources possessed by all stakeholders fostered strong collaboration in handling the earthquake and tsunami emergency response in Donggala. Interpersonal relationships among individuals or groups in knowledge sharing facilitated the rapid and accurate distribution of aid to beneficiaries.

Findings on collaborative governance are clear, but one important highlight is the lack of availability of the Earthquake and Tsunami Emergency Preparedness Document, which ideally should have been presented as an initial cooperation plan before the disaster occurred. Nevertheless, the existing conditions still managed to produce strong cooperation between the government, non-governmental organizations, and the private sector in the post-disaster emergency response.

Keywords: mobilization of principles, Motivation, Capacity for joint action

PENDAHULUAN

Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kabupaten Donggala tidak hanya menyebabkan kemerosotan perekonomian, moralitas, struktur masyarakat dan kualitas lingkungan hidup masyarakat kabupaten Donggala, namun juga menimbulkan kerusakan

besar baik pada subsistem biologi maupun ekologi sehingga mengakibatkan banyak korban, disebabkan hilangnya harta benda akibat kerusakan lingkungan yang parah dan dampak psikologis, guncangan yang mengakibatkan kehancuran dalam berbagai cara dan menimbulkan situasi dimana pihak luar diharapkan memberikan bantuan, ketika bencana berskala besar terjadi, fokusnya adalah pada tindakan segera, ketika terjadi bencana berskala besar atau situasi yang menarik perhatian pada kekacauan akibat cepatnya dampak bencana terjadi, informasi yang tersedia untuk memastikan skala kerusakan dan jumlah kematian, termasuk cedera, sangatlah terbatas, cedera akibat kerusakan infrastruktur, layanan dasar, bantuan kemanusiaan, perawatan medis, tempat tinggal, dan aspek-aspek lain dari penderitaan dan penyakit akibat bencana, penderitaan setelah bencana, baik dalam hal makanan, pakaian, atau kebutuhan lainnya, adalah sesuatu yang dapat ditanggung oleh setiap orang, peduli mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran akan bencana.

Kabupaten Donggala merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, khususnya gempa bumi dan tsunami, ada beberapa catatan sejarah yang menjaelaskan bahwa gelombang besar air laut pernah menyapu daratan kabupaten donggala di masa lalu yaitu 1 desember 1927 gempa dan tsunami pernah terjadi di teluk palu yang memakan 14 korban jiwa meninggal dunia dan 50 orang yang luka luka, 30 januari 1930 juga terjadi di pantai barat kabupaten donggala, tsunami yang mencapai ketinggian 2 meter dalam durasi 2 menit, 14 agustus 1938 terjadi di teluk tambu balaesang donggala dengan tsunami ketinggian 8-10 meter, 200 korban meninggal dunia, 790 rusak, seluruh desa di pesisir pantai barat donggala hamper tenggelam. 1 januari 1996 di selat Makassar dengan tsunami 3,4 meter, 9 orang meninggal dunia bangunan di bangkir, tonggolobibo dan donggala rusak parah, 11 Oktober 1998 gempa menguncang donggala, ratusan bangunan roboh, itu merupakan peringatan yang penting diberi perhatian yang besar.

Bencana alam berupa Gempa Bumi 28 September 2018 dengan berkekuatan 7,4 Skala Richter di kedalaman 10 km di bawah permukaan tanah sebagai pemicu Tsunami, Liquefaksi dan Tanah Longsor yang berpusat di kecamatan Sirenja kabupaten Donggala sebagai rangkaian aktivitas sesar Palu Koro, sesar paling aktif di Pulau Sulawesi, kuatnya getaran hingga dirasakan di kota Palu, kabupaten Donggala, kabupaten Sigi dan kabupaten Parigi Mautong, Gempa bumi 7,4 skala richter itu juga dirasakan di Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Utara, sementara untuk tsunami dirasakan hingga di provinsi Sulawesi Barat, ('Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018', 2022), ada banyak kerusakan yang ditimbulkan beberapa diantaranya adalah Bandar udara, pelabuhan, jalan, saluran telekomunikasi, listrik dan SPBU yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak juga terjadi serta menimbulkan korban jiwa, catatan akhir tahun Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjelaskan menelan korban meninggal hingga 2.101 jiwa, sebagai daerah terdampak bencana besar itu, kabupaten Donggala menerima dampak kerusakan dari bencana gempa bumi dan tsunami, kabupaten Donggala mengalami kerugian material sebesar 2,7 Triliun berdasarkan data terakhir yang dicatat pusat data dan informasi (PUSDATIN) dan korban jiwa yang meninggal dunia sebanyak 212 orang.

Sebagai negara rawan bencana, pemerintah telah menetapkan pedoman penanggulangan bencana sebagai suatu proses yang terpadu, dinamis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, yakni pasal 3 PP nomor 21 tahun 2008 yang menjelaskan tiga poin kegiatan: yaitu kegiatan prabencana atau kegiatan pascabencana termasuk kegiatan

mitigasi dan kesiapsiagaan, pada saat kegiatan tanggap darurat dan pemulihan, dokumen penanggulangan bencana yang disajikan bertujuan untuk menanggulangi bencana, membatasi terjadinya bencana, mencegah jatuhnya korban jiwa, kerusakan material dan lingkungan hidup, serta mengurangi risiko terjadinya bencana terhadap masyarakat dalam bentuk kerugian, kerugian ekonomi dan kerusakan, cara pemulihan sumber daya alam, pengentasan atau penghapusan penderitaan dan kesulitan korban bencana, pemulangan korban yang dievakuasi ke daerah asalnya bila memungkinkan, relokasi korban bencana ke daerah baru yang aman dan layak huni, transportasi, pemulihan fungsi fasilitas umum penting seperti sebagai air minum dan air minum, peningkatan penyediaan air, listrik, telepon, dan komunikasi, termasuk pemulihan perekonomian dan status sosial daerah yang terkena bencana, merupakan pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dari sudut pandang pembangunan, masa depan dan meminimalkan kerugian bagi individu, komunitas, dan masyarakat, negara harus meminimalkan penderitaan individu dan komunitas yang terkena dampak bencana dan menghindari kerugian pada individu, komunitas dan negara melalui tindakan pencegahan dini, langkah-langkah ini efektif sebelum bencana terjadi, memperbaiki kondisi individu dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan akibat bencana, menjadi landasan perencanaan pembangunan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara mengelola dan mengurangi dampak dan risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman.

Sebuah harapan terwujudnya penanganan bencana yang berkualitas menjadi tidak meragukan, seiring dengan pengalaman panjang dalam menghadapi bencana, serta satu hal penting yang sangat meyakinkan sebuah harapan itu benar-benar terwujud yaitu dukungan luar biasa dari banyak pihak yang bekerjasama dalam penanganan bencana, namun sebuah fakta yang tidak bisa dikesampingkan bahwa bencana besar yang terjadi masih menelan korban yang tidak sedikit, sehingga pengalaman bencana yang panjang dan dukungan luar biasa dari berbagai pihak dalam penanganan bencana khususnya pada masa tanggap darurat menjadi patut dipertanyakan, khususnya memeriksa sejauh mana dia bekerja dalam mengurangi risiko yang hadir sebagai konsekuensi bencana yang melanda, sejauh mana pemerintah memegang kuat tanggung jawabnya dalam penanganan bencana, serta bagaimana bagaimana menjalankan tugasnya salam berkolaborasi dengan pekerja sosial, masyarakat dan yang lainnya, yang oleh Emerson, Nabatchi & Balogh menyebut sebagai *Collaborative Governance*, sebuah proses dan struktur dalam pengambilan kebijakan public yang melibatkan masyarakat secara konstruktif dalam batas-batas lembaga public seperti apa, tingkat pemerintahan dan/ atau masyarakat, sector swasta dan masyarakat sipil, untuk melaksanakan kepentingan public tidak dapat tercapai tanpa keterlibatan sector swasta dan masyarakat (Nurhannis & Asrifai, 2019).

Satu hal yang menjadi alasan kuat untuk memeriksa bagaimana hal itu bekerja adalah bahwa, terjadinya bencana alam tersebut diketahui melibatkan Lembaga non pemerintah dan Sector Swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri melibatkan diri membantu pemerintah daerah dalam menangani tanggap darurat hingga sampai pada tahap pemulihan, keterlibatan membantu pemerintah daerah dalam proses menangani korban bencana alam tersebut, menggambarkan terjalannya interaksi antara Pemerintah, Lembaga non pemerintah dan Sektor Swasta yang digambarkan sebagai *Collaborative Governance*. Artikel ini berusaha memahami bagaimana kolaboratif bekerja dalam proses penanganan tanggap darurat dengan mengangkat tema penting yang berjudul “Dinamika *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Bencana Alam Di Kabupaten Donggala”. menelusuri dinamika *collaborative governance* dalam penanganan bencana

alam gempa bumi dan tsunami 28 september 2018 di kabupaten Donggala pada masa tanggap darurat yang dilakukan oleh tiga pilar *stakeholder* yaitu pemerintah, lembaga non pemerintah dan sector swasta, dengan menggunakan tiga aspek konsep teori Emerson, Nabatchi & Balogh yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan kapasitas melakukan tindakan bersama.

Memahami Penggerakan prinsip bersama dengan memeriksa sejauh mana tujuan bersama ditegaskan, sejauh mana pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip bersama dibangun melalui dialog tatap muka atau melalui perantara teknologi sebagai bentuk komitmen kuat pada penyatuan prinsip, pemeriksaan lebih lanjut dengan mengungkap beberapa komponen dalam penggerakan prinsip bersama yaitu, mengapa actor tersebut bergabung ke dalam kolaborasi, sejauh mana actor dapat mengemukakan pendapat, bagaimana diskusi bersama dilakukan dalam bentuk keterbukaan berpendapat, menyatakan ketidaksetujuan, diskresi, sehingga membentuk kualitas deliberasi, dan determinasi atau sejauh mana serangkaian penetapan bersama akan tujuan berkolaborasi, baik itu determinatif primer berupa pembuatan keputusan procedural (teknis kolaborasi, penetapan agenda, jadwal pertemuan, kelompok kerja) termasuk juga determinatif substantif yang lebih kepada pembentukan kesepakatan bersama sebagai rekomendasi final untuk tindakan kolaborasi di masa depan. Prinsip Bersama berusaha mengungkap, sejauh mana aspek kemanusiaan mengambil bagian sebagai penentu keterlibatan mereka, atau keikutsertaan segenap komponen dalam penanganan bencana, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Sulteng Bergerak mengklaim aspek kemanusiaan itu sebagai alasan mereka terlibat, termasuk PT. Jamkrindo, atas dasar kemanusiaan itu juga mereka bergerak tidak menunggu lama setelah bencana terjadi secara bersamaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala sebagai pemegang tanggungjawab dalam menanggulangi bencana membuka ruang kerjasama yang kuat dalam penanganan bencana.

Memahami motivasi Timbal Balik dengan mempertimbangkan siklus penguatan elemen saling percaya, saling pemahaman, legitimasi dan komitmen internal, mempertimbangkan upaya berkelanjutan dalam interaksi untuk mengenal satu sama lain dan menunjukkan rasa dapat dipercaya hubungan antar aktor, seperti saling percaya, saling ketergantungan, kolaborasi, pengalaman berkolaborasi dengan aktor lain, apakah hal tersebut menimbulkan kepercayaan atau dapat menimbulkan dampak negatif, budaya para aktor, adanya hubungan personal antar aktor atau adakah peran individu lain yang mempengaruhi hubungan antar aktor, hubungan kepercayaan dengan aktor lain, saling pengertian atau sejauh mana aktor-aktor lain saling memahami dan menghormati perbedaan satu sama lain mengarah pada kualitas interaksi interpersonal antara individu dan organisasi, sejauh mana pengaruh kepercayaan terlihat dalam kolaborasi, Legitimasi internal atau rentang persepsi yang timbul dari kerja sama internal, yaitu sejauh mana aktor yang bekerja sama dapat diandalkan atau diandalkan untuk menjalankan tugas dan perannya, pemahaman bersama tentang faktor motivasi bersama, dan hubungan dengan kepercayaan bersama, sehingga mempengaruhi, kualitas khusus. Motivasi Bersama. Dalam penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Donggala, kolaborasi yang kuat antar segenap pemangku kepentingan dijadikan sebagai penyangga untuk memastikan semua masalah terselesaikan dengan baik, karena begitu banyaknya urusan mendesak yang harus diselesaikan ditambah lagi dengan luasnya cakupan wilayah terdampak menjadi alasan pentingnya kolaborasi yang kuat dihadirkan dalam penanganan bencana, satu hal yang mengembirakan pasalnya begitu banyak komponen yang tergerak untuk ikut serta dalam penanganan bencana atas dasar nilai kemanusiaan menjadikan bencana

menjadi urusan bersama, kolaborasi terbangun melalui hubungan interpersonal individu maupun kelompok.

Dengan mempertimbangkan prosedur dan kesepakatan bersama, termasuk aturan umum, protokol kegiatan, aturan pengambilan keputusan, dll. berbagai elemen lintas fungsi dapat Memahami kemampuan untuk melakukan tindakan kolektif dengan mempertimbangkan konsekuensinya. Misalnya dapat diwujudkan melalui perjanjian informal dan formal yang mereproduksi perjanjian formal dengan memberikan landasan hukum kerjasama untuk memahami hubungan kerjasama yang kompleks dan berjangka panjang, validasi kepemimpinan untuk memastikan kehadiran pemimpin kolaboratif dengan memvalidasi peran pemimpin, apakah peran pemimpin sebagai pihak yang mencari dukungan kerjasama, penggagas pertemuan, sebagai moderator atau fasilitator, atau sebagai perwakilan subyek dan kerjasama.

Sebagai distributor pengetahuan yang secara kolektif mempromosikan penggunaan teknologi dan mengadvokasi masyarakat secara keseluruhan. Tinjauan pengetahuan, apakah pengetahuan akan ditemukan dalam pertemuan bersama, apakah peran akan dimainkan dalam kerja sama, dan yang terakhir, sumber daya untuk pendanaan, waktu dan pembagian peran, teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan dan gotong royong. kebutuhan ahli analisis kerjasama dan pelaksana lapangan, kebutuhan tenaga ahli, kemampuan bertindak kolaboratif, aspek finansial semua pihak dalam menangani bantuan darurat gempa dan tsunami Dongala, hubungan antar manusia, pencarian pengetahuan antar individu atau kelompok dapat membantu proses penyaluran bantuan menjadi lebih cepat dan efisien hingga ke penerima manfaat.

KAJIAN PUSTAKA

Kolaborative Government dalam Penanganan Bencana Alam

Kolaborasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “co-labor” atau bekerja bersama, istilah kolaborasi muncul pada abad ke-19 dan mulai digunakan ketika proses industrialisasi mulai berkembang, akibatnya organisasi berkembang menjadi struktur organisasi yang semakin kompleks, mulai diciptakan untuk membagi kerja para pekerja dalam organisasi, oleh karena itu, kompleksitas organisasi merupakan titik awal yang penting untuk kolaborasi yang digunakan berulang kali di berbagai organisasi, (Wanna, 2008:3). Kerja sama atau kolaborasi mengacu pada keterlibatan para pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi adalah aktivitas mendasar dalam pengelolaan jaringan sosial, Jejaring sosial berbentuk simpul komunikasi antar pemangku kepentingan, poin pentingnya adalah bahwa teori kooperatif merupakan analisis mengenai tata kelola, mengelola dari perspektif jaringan sosial atau model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam dialog di mana pemangku kepentingan mewakili diri mereka sendiri dengan mengungkapkan kepentingan mereka (Booher dan Innes, 2002).

Kerjasama adalah suatu kegiatan yang melibatkan tindakan bersama, hubungan timbal balik dan pemahaman antara pihak-pihak yang berkepentingan, baik lembaga atau kelompok, untuk mencapai hasil dan manfaat. (Haryono, N., 2012:48), Kerja sama dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu kerja sama dalam arti prosedural dan kerja sama dalam arti normatif, pengertian kerjasama dalam artian suatu proses adalah sekumpulan cara atau cara mengorganisir, mengelola atau mengelola suatu proyek, menunjukkan keikutsertaan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah berdasarkan kebutuhan dan tujuannya, struktur kerjasama ini dapat disusun sebagai berikut: Kolaborasi ini dapat mencakup hanya lembaga pemerintah, hanya organisasi non-pemerintah lokal, hanya

individu swasta, yang berafiliasi dengan pemerintah dan bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah lokal, yang didanai pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah. lembaga yang dibiayai dari pihak asing Memahami bahwa ini adalah aspirasi atau filosofi yang ingin dicapai pemerintah melalui kerja sama dengan mitranya. Dalam praktiknya, tata kelola kooperatif mungkin bukan sebuah organisasi formal, melainkan sebuah cara bertindak/berperilaku sebagai entitas non-pemerintah yang lebih besar yang terlibat dalam administrasi publik untuk jangka waktu tertentu. Gambaran ini menunjukkan ruang lingkup kerjasama. Namun secara umum, para pemangku kepentingan mempunyai tujuan yang sama, (Mutiarawati, Tika, S. 2021), semudah memberikan pengertian tentang kerjasama, pengertian kerjasama menjadi lebih kompleks jika dikaitkan dengan kata pemerintah.

Umumnya istilah pemerintah digunakan untuk organisasi atau lembaga yang mempunyai yurisdiksi terhadap suatu negara, (Kooiman, 2007), Pemerintah berarti subjek interaksi di dalam pemerintahan, interaksi itu sendiri merupakan hubungan produktif antara dua aktor atau lebih, Pengertian pemerintahan merupakan suatu konsep administrasi publik yang bersifat hirarkis dan lama, yang menekankan pada badan atau lembaga hanya sebagai satu-satunya pengatur dan pelaksana administrasi publik, konsep governance menggantikan konsep pemerintahan dalam aspek pemerintahan dan penelitian, konsep pemerintahan bersifat horizontal dalam arti kedudukannya setara dan hanya fungsinya saja yang berbeda, Bedanya, konsep governance tidak identik dengan konsep pemerintahan, melainkan suatu perubahan paradigma, karena governance secara luas mencakup seluruh lembaga dan elemen masyarakat, baik pemerintah maupun swasta, teori Governance berupaya memahami interdisipliner ilmu politik, administrasi publik, sosiologi ekonomi, dan hukum. Daya tarik Governance menjelaskan bahwa pemerintah, sebagai aktor negara, melibatkan aktor non-negara seperti sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk bersama-sama mengembangkan kebijakan publik, (Sorensen & Triantafillou, 2013), Governance dipahami sebagai jaringan interaksi antara pemerintah dan masyarakat mengenai perumusan program, mulai dari proses kebijakan publik hingga implementasi dan evaluasi kebijakan untuk menilai keberhasilan program yang dilaksanakan, (Kaufmann et al., 2004).

Governance berfokus pada pentingnya melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan. Hal ini disebabkan karena proses pengambilan keputusan dan implementasinya menjadi semakin kompleks serta terdapat tantangan dan permasalahan yang harus diatasi, (Dwiyanto, 2015). *Governance* secara umum dapat dipahami sebagai suatu bentuk transisi dari implementasi kebijakan publik yang tidak hanya fokus pada pemerintah tetapi juga melibatkan aktor lain seperti masyarakat dan sektor swasta, (Stoker, 1998) Governance mengacu pada serangkaian lembaga atau aktor yang terlibat, baik di dalam pemerintahan itu sendiri maupun aktor eksternal di luar pemerintah, Governance membantu menyelesaikan ambiguitas politik dalam memecahkan masalah sosial dan ekonomi, Governance mengakui kemampuan aktor pemerintah dan non-pemerintah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan kolektif, Governance adalah pengetahuan tentang jaringan aktor-aktor yang memiliki pemerintahan sendiri, Governance membantu kita menyadari pentingnya mengembangkan kebijakan publik yang tidak hanya terfokus pada satu kekuasaan pemerintah saja. (Stoker, 1998)

Dalam karya Roderick Arthur William Rhodes menjelaskan bahwa ada empat ciri utama yang membedakan governance dan Government antara lain: 1). "*governance*" mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan Government karena melibatkan aktor selain

negara dan menimbulkan saling ketergantungan antar organisasi. 2). Keberlanjutan hubungan pertukaran antar anggota, hal ini karena mereka termotivasi oleh kebutuhan untuk bertukar dan menegosiasikan sumber daya untuk membaginya. 3). Hal ini didasarkan pada rasa saling percaya dan diatur oleh aturan-aturan yang dihasilkan dari negosiasi dan kesepakatan para pihak. 4). *colaboratif governance* secara signifikan meningkatkan independensi atau otonomi dari pemerintah, dan memungkinkan satu atau lebih badan publik untuk melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam kemauan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, dan terarah, diinstruksikan untuk membentuk atau menegakkan perjanjian publik dan mengelola program atau aset publik, (Ansell and Gash, 2007). *Collaborative governance* digunakan untuk mengatasi masalah publik, pemerintah tidak dapat menyelesaikan masalah ini sendirian karena mempunyai waktu yang terbatas., oleh karena itu, harus ada pola kerja sama atau yang disebut kolaborasi yang mengajak aktor-aktor di luar pemerintah untuk berpartisipasi dalam proses politik publik, (Charalabidis & Loukis, 2012).

Emerson, Nabach, dan Balogh menjelaskan *Collaborative Governance* yaitu proses perancangan kebijakan publik yang secara konstruktif melibatkan masyarakat dalam kepentingan implementasi publik dalam batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan dan atau masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil, hal ini tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan pihak swasta dan masyarakat, (Nurhannis & Asrifai, 2019). *Collaborative Governance* adalah partisipasi seluruh lembaga untuk memulai upaya bersama dan partisipasi seluruh inisiatif masing-masing lembaga (stakeholder) untuk menetapkan atau menentukan tujuan, mengevaluasi hasil, membawa perubahan, dan sebagainya. Terkait dengan kolaborasi, penggagasnya mengevaluasi inisiatif ini melalui tiga aspek: 1). Inisiatif datang dari aktor-aktor yang memiliki klaim jelas untuk mencerminkan kepentingan publik. 2). Setiap pemangku kepentingan atau lembaga yang berkolaborasi harus berperan dalam menentukan tujuan kolaborasi. 3). Hubungan antar institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya, setiap lembaga selalu dianggap transparan dalam menjalankan kegiatannya, dan lembaga lain pun turut serta dalam transparansi tersebut. (Donahue, 2011).

Kapan menerapkan *collaborative governance*, Saiger, (2011) mengkategorikan delapan prinsip utama dalam penerapan *collaborative governance* sebagai berikut: 1). Anggota masyarakat harus terlibat dalam produksi barang publik, 2). Masyarakat harus mampu mengerahkan sumber daya dan aset untuk menyelesaikan permasalahan publik 4). Para ahli perlu berbagi keahliannya untuk memberdayakan anggota masyarakat, 5). Kebijakan harus mencakup konsultasi publik, 6). Kebijakan harus mencakup kemitraan kerjasama yang berkelanjutan, 7). Kebijakan harus strategis, 8). Kebijakan harus memperkuat masyarakat dan mentransformasikan institusi untuk menyelesaikan permasalahan publik, dan kebijakan tersebut harus mencakup akuntabilitas, Grewald (2008) menyatakan sukses atau tidaknya Collaborative Governance dapat dinilai berdasarkan beberapa faktor, antara lain: 1). Wewenang adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk mengambil keputusan, mengambil keputusan, atau melakukan tindakan tertentu. 2). Kekuasaan berbasis sumber daya mengacu pada saling ketergantungan antara organisasi terkait yang bekerja sama dan kemampuan mereka untuk mengonsumsi sumber daya. 3). Legitimasi diskursif mengacu pada kemampuan organisasi untuk mewakili atau menyuarakan wacana di ruang publik, Proses collaborative governance harus mempertimbangkan beberapa tahap, berikut tahapan proses dinamis tata kelola kolaboratif yang dikemukakan oleh Kick Emerson, Tina

Nabatchi, dan Stephen Balogh, dengan kata lain: Menggerakkan prinsip-prinsip umum, kedua, Motivasi bersama dan ketiga, kemampuan melakukan tindakan bersama.

Pertama; Penggerakan prinsip bersama, diasumsikan mengenai penegasan tujuan-tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip umum, yang seringkali diungkapkan dalam perspektif aktor yang berbeda, Melalui dialog langsung atau melalui perantara teknologi, hal terpenting dalam memobilisasi prinsip-prinsip bersama adalah kesatuan prinsip, pergerakan Prinsip bersama terdiri dari beberapa elemen: **Pengungkapan;** Suatu proses upaya untuk memperjelas kepentingan, nilai-nilai para aktor dan membangun kepentingan bersama, pengungkapan dapat dianalisis berdasarkan alasan mengapa aktor berpartisipasi dalam kolaborasi tersebut. **Deliberasi;** Nasihat dikembangkan melalui diskusi kolaboratif, keterbukaan pendapat, ekspresi ketidaksepakatan, dan kebijaksanaan, dari sinilah kualitas nasihat atau deliberasi terbentuk, diskusi kolaboratif memungkinkan semua pihak menyampaikan pandangannya. **Determinasi;** Keputusan atau determinasi adalah definisi bersama dari serangkaian tujuan bersama, ada dua jenis keputusan: keputusan primer dan keputusan kritis, ketentuan pokoknya menyangkut pengambilan keputusan secara prosedural (cara kerja sama, penetapan agenda, jadwal rapat, kelompok kerja), sedangkan ketentuan substantifnya menyangkut tata cara pembentukan kesepakatan bersama dan rekomendasi akhir tindakan bersama di masa depan.

Kedua; **Motivasi bersama,** motivasi bersama cenderung dianggap sebagai pola dukungan yang menggabungkan komponen kepercayaan bersama, perspektif bersama, keaslian interior, dan tanggung jawab, *Kepercayaan bersama;* perlunya upaya yang gigih dari kerja sama untuk saling menyadari (menemukan), dan menunjukkan nilai yang dapat diandalkan. Selain itu, ada beberapa hal yang berdampak, misalnya saja ketergantungan koneksi, hubungan antar entertainer di luar upaya yang terkoordinasi, pengalaman bekerja sama dengan entertainer yang berbeda, lebih spesifiknya apakah dapat memberikan kepercayaan atau malah berdampak buruk, caranya. kehidupan para penghibur, adanya hubungan individu antar penghibur, atau apakah ada pekerjaan berbeda dari individu yang berdampak pada hubungan saling percaya dengan penghibur yang berbeda, *pemahaman bersama;* Hal ini menyiratkan bahwa penghibur individu memahami dan menghargai perbedaan satu sama lain, pemahaman umum mendorong sifat komunikasi relasional antara orang-orang dan asosiasi, perkembangan pemahaman bersama sering kali dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk dalam upaya bersama. *Legitimasi Internal;* merupakan pengakuan yang lahir dari upaya yang terkoordinasi dari dalam, khususnya bahwa penghibur yang kooperatif dapat diandalkan atau sah dalam menjalankan kewajiban dan pekerjaannya, keaslian interior, sikap saling pandang, dan kepercayaan bersama merupakan tiga komponen yang saling berkaitan erat satu sama lain dalam sebuah hubungan. bagian inspirasi umum, jadi komponennya Selain itu, tanggung jawab juga cukup banyak dipengaruhi oleh sifat ketiga komponen tersebut.

Ketiga; *Kapasitas melakukan tindakan bersama,* merupakan berbagai hasil dari lintas komponen yang bermanfaat untuk menciptakan kegiatan yang berdaya guna, karena terbatasnya jumlah penghibur, Teknik dan Pengaturan Bersama; Metodologi dan pengaturan bersama menggabungkan prinsip-prinsip umum, konvensi gerakan, dan aturan-aturan untuk pengambilan keputusan secara sederhana dan hal ini semua dapat diwujudkan melalui pengaturan yang kasual dan formal, meskipun demikian, dalam upaya yang rumit dan terkoordinasi dalam jangka panjang, diperlukan pengaturan yang lebih tepat, seperti menyusun alasan yang sah untuk bekerja sama. *Kepemimpinan,* (oleh pemimpin kolaboratif) Dalam proses usaha bersama terdapat pionir yang berperan, yaitu:

a). sebagai pihak yang mencari dukungan kolaborasi, b). Memulai perkumpulan, c). Fasilitator dan arbiter, d). Penggambaran entertainer dan kerja sama secara keseluruhan, e). Penyalur informasi, f). Memberi energi pada pemanfaatan inovasi secara kerjasama, dan g). Melakukan dukungan kepada masyarakat umum, *Pengetahuan*; Dalam kerjasama, informasi atau pengetahuan adalah data-data yang diperlukan para penghibur untuk ikut serta dalam proses upaya yang terkoordinasi, informasi terdapat dalam pertemuan-pertemuan bersama, dalam pertemuan-pertemuan bersama ditampilkan hasil-hasil dari prestasi setiap penghibur, kemudian perbincangan dan dinamika bersama menjadikan informasi itu penting. selanjutnya diharapkan dalam upaya yang terkoordinasi. Aset, yang dimaksud dengan sumber daya adalah: a). subsidi moneter, b). pembagian waktu dan pekerjaan, c). bantuan administrasi dan teknis dalam melaksanakan kegiatan, d). saling menawarkan bantuan, e). persyaratan kerjasama dokter spesialis pemeriksaan, dan f), pelaksana di lapangan, dan, g), persyaratan spesialis atau kepakaran.

Penanganan Bencana Alam dalam sebuah regulasi yang mengikat

Dalam menanggulangi bencana, Peraturan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Bencana merupakan wilayah utama yang berkualitas bagi suatu peraturan yang memberi makna pada penyelenggaraan bencana para penyelenggara yang berisi tentang gerakan upaya, penetapan teknik-teknik perbaikan yang ada di dalamnya. ancaman kegagalan, penanggulangan bencana, tanggap darurat dan reklamasi, pelaksanaan penanggulangan bencana. lihat empat poin yang menghitung bagian sosial, yang berhubungan dengan uang dan sosial dari masyarakat; bagian dari daya dukung lingkungan hidup; bagian dari kenyamanan dan kewajiban; serta pemekaran lingkungan yang luas, terlihat bahwa, dalam melaksanakan kesulitan, dewan, spesialis terbuka, dan badan pemerintahan umum adalah pihak yang berhati-hati.

Spesialis terbuka bertanggung jawab untuk melaksanakan kesulitan dewan, (1). peluang bencana berkurang dan perencanaan bahaya bencana berkurang dengan program pembangunan, (2), mempertahankan sistem dari dampak bencana, (3), menjamin terpenuhinya manfaat sistem dan pengungsian yang terkena bencana secara konvensional dan sesuai standar bantuan yang diberikan sekecil apapun, (4). pemulihan dari dampak bencana, (5). menyebarkan bencana yang menguntungkan yang diatur oleh dewan investasi dalam rencana terkait upah dan penggunaan uang Negara, (6), membagi bencana yang diatur oleh pengelola anggaran untuk memanfaatkan simpanan; dan (7), memelihara kronik-kronik dan catatan-catatan yang substansial dan jujur terhadap kebaikan dari bahaya dan dampak bencana, sedangkan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan bencana yang dikonsolidasikan oleh para pejabat (1), menjamin terpenuhinya kewajiban-kewajiban tersebut. fleksibilitas sistem dan individu yang terkena dampak bencana sesuai dengan standar bantuan yang diberikan, (2), melindungi masyarakat dari dampak bencana, (3), mengurangi risiko bencana dan mengkonsolidasikan bahaya bencana berkurang dengan program perubahan; Selain (4), sebagian besar kerugian yang disubsidi dewan dalam rencana investasi gaji dan pemanfaatan daerah, selain memiliki risiko sehubungan dengan pelaksanaan bencana para pejabat, spesialis Terbuka dan administrasi yang dikelola negara juga memiliki sejumlah kelebihan..

Konsolidasi spesialis pemerintah; Memilih teknik penanganan bencana dengan pendekatan peningkatan terbuka, Membuat tindakan perubahan yang mengkonsolidasikan komponen-komponen tindakan dewan yang merugikan, Memilih status dan tingkat perselisihan terbuka dan regional, Memilih pendekatan kolaborasi dalam insiden yang dilakukan administrator dengan negara berbeda, organisasi atau acara

sosial lainnya di seluruh dunia, Definisi metodologi sehubungan dengan pemanfaatan kemajuan yang mungkin menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana, Menentukan pendekatan terhadap pengendalian lahan hutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui kemampuan alam untuk memulihkan diri ; terlebih lagi, Mengontrol kombinasi dan penyebaran uang tunai atau saham dalam skala terbuka, sedangkan kontrol negara-negara regional ikut serta; Memilih teknik bencana yang dilakukan para pejabat di daerah dalam kaitannya dengan tindakan peningkatan regional, Membuat tindakan kemajuan yang menggabungkan komponen-komponen kemalangan yang pendekatan dewan, Melaksanakan tindakan dukungan dalam perselisihan mengenai dewan dengan daerah dan lokasi yang berbeda /komunitas perkotaan, Mengkoordinasikan pemanfaatan kemajuan yang mungkin menjadi sumber bahaya atau bahaya di wilayah tersebut, Mencari tahu metodologi untuk menggagalkan pengendalian dan penipisan sumber daya alam yang melebihi kapasitas alami daerah, dan Mengontrol pengelompokan dan penyebaran sumber daya alam uang tunai atau barang pada skala umum, zona dan kota.

Untuk melakukan bencana bagi para pengurus, jelas ada lembaga yang dikepeng dan mempunyai kedudukan sebagai Badan Bencana Terbuka, pada tingkat Spesialis Terbuka sebagai pelaksana dalam melaksanakan bencana alam, khususnya Organisasi Pejabat Bencana Terbuka atau BNPB, yang dapat berupa yayasan pemerintah non departemen pada tingkat administrasi, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah dan peraturan serta masyarakat perkotaan yang melakukan musyawarah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, dalam melakukan musyawarah terdapat lembaga yang dikoordinasikan dalam Petunjuk Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana Badan, Undang-undang Informal Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penindakan Bencana Pejabat dan Tata Pemerintahan Peraturan Umum Donggala Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kesusahan Umum Badan mempunyai tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu: Pra-kegagalan, Tanggap Darurat, Pascabencana. Pra-kegagalan, adalah apa yang terjadi di mana tidak terjadi bencana, yang meliputi: bencana yang dilakukan pejabat penyelenggara; peluang bencana berkurang; antisipasi; koordinasi yang dibuat adalah perencanaan, keperluan pemeriksaan bahaya bencana, pelaksanaan dan pelaksanaan rencana tata ruang, bimbingan dan perencanaan, serta prasyarat prinsip-prinsip khusus untuk penanggulangan bencana, sedangkan dalam keadaan yang mempunyai potensi terjadinya bencana, meliputi: kesiapan; hukuman awal; terlebih lagi, mitigasi kesulitan.

Tahapan Kedua adalah Tanggap Darurat, dengan penilaian yang cepat dan tepat mengenai jangkauan, kerusakan, dan penghitungan sumber daya: pertimbangan wilayah bencana; jumlah korban; merugikan sistem dan tempat kerja; gangguan terhadap kemampuan organisasi terbuka dan pemerintah; Kapasitas sumber daya adat dan palsu. Memilih keadaan dengan darurat bencana bergabung: perencanaan SDM; pengiriman peralatan; organisasi operasi; pergerakan, keluarkan dan isolasi; mengizinkan; pengamanan produk/administrasi; dewan dan komitmen sehubungan dengan uang tunai dan juga barang; melindungi; terlebih lagi mengatur penataan area/kantor. Penyelamatan dan pembersihan sistem yang terkena dampak bencana mencakup: mencari dan menyelamatkan korban; bantuan penawaran darurat; selain itu, banyaknya korban jiwa. Merawat kebutuhan dasar bergabung: memerlukan air bersih dan sanitasi; makanan; pakaian; organisasi kemakmuran; organisasi psikososial; dan berbagai sampul. Keamanan untuk pertemuan yang lemah bergabung: bayi, bayi dan anak-anak; ibu yang sedang hamil atau menyusui; individu yang mengalami gangguan dan lansia, dan pembangunan kembali fasilitas dan kerangka dasar secara cepat, terutama dengan memperbaiki atau mengganti kerusakan yang disebabkan oleh bencana.

Rencana ketiga adalah pascabencana, sebagai pembangunan kembali dan hiburan. Pembangunan kembali mengkonsolidasikan: mengerjakan iklim zona perang; perubahan sistem terbuka dan tempat kerja; memberikan tawaran bantuan untuk memukimkan rumah perorangan; pemulihan mental sosial; organisasi kemakmuran; perselisihan tekad dan kompromi; pemulihan anggaran dan sosial; pemulihan keamanan dan bertanya; pemulihan kemampuan pemerintah; terlebih lagi, pemulihan kemampuan bantuan terbuka. Hiburan bergabung: Memperbaiki pendirian dan tempat kerja; Mengubah tempat kerja sosial; Membangun kembali kehadiran sosial dan sosial dari zona lingkungan; perubahan rencana dan penerapan peralatan tahan bencana yang sesuai; Partisipasi dan kerja yayasan dan afiliasi sosial, dunia perdagangan dan masyarakat, bekerja pada lingkungan bertetangga, keuangan dan sosial; Menumbuhkan kemampuan organisasi terbuka; terlebih lagi, Bekerja pada organisasi-organisasi penting secara lokal. Terlepas dari kenyataan bahwa Pakar Terbuka dan Negara-Negara Terdekat telah menetapkan aturan untuk menangani peristiwa-peristiwa bencana yang diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kegagalan dan dampaknya, sebagai keterbukaan bersama kami juga berkomitmen untuk menjaga gerakan terbuka yang menyenangkan di tempat terbuka. mata, menjaga keseimbangan, kesesuaian dan kepastian kemampuan bersama dan bencana total yang dilakukan para pejabat. Terlebih lagi, memberikan informasi yang benar kepada masyarakat luas seputar kesulitan yang dihadapi para pengelola.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang didasarkan pada fenomena dan gejala sosial, dengan menggunakan wawancara terbuka untuk mengkaji sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang di lapangan. Penelitian ini menggunakan teori Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011) untuk mengevaluasi tiga komponen pemerintah, LSM, dan swasta dalam merespon bencana alam gempa dan tsunami 28 September 2018. Mengkaji dinamika kerjasama. Selama fase tanggap darurat, setiap langkah proses dinamika kolaboratif didukung: mobilisasi prinsip-prinsip bersama, motivasi bersama, dan kemampuan untuk melakukan tindakan bersama. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan peneliti, serta data yang diperoleh dari sumber seperti memo, buku, jurnal, laporan pemerintah, artikel dan publikasi baik sebagai teori maupun yang ada di lapangan. diperoleh melalui observasi langsung, pengumpulan data melalui wawancara tanya jawab tatap muka dengan berbagai informan, dan pengumpulan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Collaborative Governance dalam Penanganan Bencana Alam

Penanganan bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di kabupaten Donggala menunjukkan adanya keterlibatan sektor lain selain pemerintah, ekuivalen dengan pemikiran *collaborative governance*, sebuah konsep yang biasanya digunakan dalam melihat hubungan antara pemerintah, lembaga non pemerintahan dan sektor swasta dalam penanganan masalah di masyarakat, meskipun untuk mengklaim bahwa *collaborative governance* benar-benar ada, perlu memeriksa dan memastikan banyak hal, tidak cukup dengan hanya melihat pada adanya keterlibatan saja, pemeriksaan begitu dalam yang dilakukan berhasil menunjukkan informasi menarik yang mengarah dan mendukung

klaim adanya *collaborative governance* dalam penanganan bencana alam yang terjadi di kabupaten donggal pasca bencana besar melanda yang diketahui memakan korban tidak sedikit itu, pemikiran Emerson, Nabatchi & Balogh (2011) yang digunakan dalam melihat adanya *collaborative governance* dengan tiga aspek yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan kapasitas melakukan tindakan bersama, berahir pada kesimpulan bahwa dinamika collaborative government benar-benar hadir dalam penanganan bencana alam di kabupaten Donggal, di masa tanggap darurat, berupa adanya relasi yang kuat dalam penanganan bencana antara Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Sektor Swasta serta Lembaga non pemerintah dan masyarakat.

2. Prinsip Bersama menjadi alasan penggerak di masa Tanggap Darurat

Sebagai upaya untuk mengklaim adanya *collaborative government* dalam penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami di masa tanggap darurat yang terjadi di kabupaten Donggala, artikel ini menyunghkan banyak informasi penting yang kuat yang mendukung klaim bahwa kolaborasi benar benar hadir dalam penanganan bencana, khususnya di masa tanggap darurat, jika kolaborasi menjadikan adanya penggerakan prinsip bersama sebagai alasan adanya kolaborasi maka ada banyak hal yang bisa menjelaskan itu, adanya penegasan kembali tujuan bersama lebih dari cukup untuk sampai pada klaim tersebut, lebih jauh dari itu, penggerakan prinsip bersama dalam penanganan bencana dimasa tanggap darurat dilakukan dengan cara yang sangat bervariasi, satu hal penting yang sangat menonjol adalah dialog tatap muka diantara mereka yang terlibat, meskipun dialog tatap muka ditengah kondisi darurat tidak semudah dalam kondisi normal, dalam masa tanggap daruta, perkembangan teknologi sangat membantu dalam membangun komunikasi diantara mereka, penegasan adanya prinsip bersama lebih jauh dapat terlihat juga pada beberapa hal penting berikut ini;

Pengungkapan atau proses pengungkapan kepentingan, nilai-nilai actor serta upaya konstruksi kepentingan bersama, untuk memahami itu, artikel ini mengungkap alasan mengapa actor bergabung ke dalam kolaborasi, informasi yang diperoleh menunjukkan alasan yang sangat bervariasi, yang ditemui, beberapa diantaranya adalah, atas dasar kemanusiaan, tanggungjawab lembaga, dan tujuan organisasi, meskipun secara umum bahwa alasan kemanusiaan menjadi bagian penting yang menarik mereka mengambil bagian dalam penanganan bencana di masa tanggap darurat, disamping aspek lain seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dengan tugasnya sebagai pelaksana giat-giat penanggulangan bencana di daerah, selebihnya tergerak atas dasar kemanusiaan sebagai alasan utam, ha itu terlihat bahwa sejak Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai status keadaan darurat, Muhammadiyah Disaster Management Center langsung datang ke Sulawesi Tengah dan melakukan giat-giat penanggulangan bencana, begitupun Celebes Bergerak langsung dibentuk dan dalam waktu cepat dan langsung melakukan aksi, hal yang sama juga dengan Jamkrindo yang langsung melakukan open donation di lingkup internalnya dan ditambahkan dengan dana CSR yang mereka miliki, mereka tergerak atas dasar kemanusiaan, aspek kemanusiaan benar-benar menjadi penentu keterlibatan segenap komponen dalam penanganan bencana, sebagaimana klaim mereka yang ditemukan dalam proses penggalian informasi melalui wawancara dengan pertanyaan yang ketat.

Klaim tentang adanya tujuan yang sama dari berbagai actor yang terlibat, terjelaskan pada aktifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penyelenggara penanggulangan bencana yang dalam banyak kesempatan berupaya menyatukan prinsip untuk berkolaborasi dari berbagai actor yang terlibat, pernyataan Sekertaris BPBD Kabupaten Donggala *Ir Muh Mursid* memperkuat dengan mengatakan bahwa dalam

penanggulangan bencana alam telah ada pedoman di dokumen rencana kontinjensi, yang lebih luas menjelaskan system komando darurat, meskipun rencana kontigensi yang digunakan saat bencana alam 2018 merupakan renkon banjir bandang, penggunaan itu dikarenakan belum ada renkon mengenai gempa bumi dan tsunami, sehingga renkon banjir bandang digunakan, meskipun ada sedikit penyesuaian di dalamnya, terlebih bahwa dalam system komando darurat itu telah mengkoordinir dan menggerakkan semua komponen untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat terorganisir, baik dari lintas sektor pemerintah, swasta, Lembaga non pemerintah atau masyarakat yang melakukan tindakan itu, maka dia harus berkoordinasi dengan BPBD sebagai pusat komando penyelenggara penanggulangan bencana alam di daerah, ketidak siapan menghadapi gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 28 september 2018 dengan tidak tersedianya rencana kontigensi tidak membatasi upaya mereka mengaktifkan komando darurat meskipun harus menyesuaikan dengan rencana kontinjensi banjir bandang, tidak membatasi mereka kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Lembaga non pemerintah serta sector swasta.

Tanggungjawab lembaga, di samping alasan kemanusiaan yang mengundang keterlibatan banyak komponen dalam penanganan bencana alam yang terjadi di Donggala khususnya di masa tanggap darurat, tanggungjawab lembaga juga menjadi bagian penting sebagai alasan mereka terlibat, hal itu diungkap oleh sekretaris BPBD Donggala Ir. Muh Mursid Sanduan, dia menjelaskan bahwa amanat undang-undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam proses sebuah penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan BPBD terdiri dari dua unsur yaitu sebagai pengarah penanggulangan bencana dan sebagai pelaksanaan penanggulangan bencana, klaim itu memberikan penegasan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD memiliki tanggungjawab dan berperan penting dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengaturnya, baik itu berupa bencana alam, bencana non alam dan bencana social, informasi tentang peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD itu dikonfirmasi Yocki Asmoro dari National Program Coordinator Muhammadiyah Disaster Management Center. Fihak National Program Coordinator Muhammadiyah Disaster Management Center itu mengatakan sejak hari pertama terjadinya bencana alam itu, MDMC sudah masuk ke Sulawesi Tengah dan menjadikan Universitas Muhamadiyah Palu sebagai posko koordinasi dan juga sebagai posko mengelola pengungsian, aktifitasnya itu berkoordinasi terkait izin di posko induk Korem 132 Tadulako, dan ketika melakukan penanganan di kabupaten terdampak, dia izin ke BPBD yang ada di kabupaten, ragam aktifitas yang mereka lakukan antara lain focus di medis, logistic, hunian darurat hingga hunian sementara, psikososial, pendidikan, SAR, camp management.

Tujuan organisasi, disamping alasan kemanusiaan dan tanggungjawab lembaga, tujuan organisasi juga menjadi alasan penting keterlibatan mereka, Firmansyah sebagai Manajer keuangan Celebes Bergerak, menjelaskan bahwa Celebes bergerak muncul atas inisiatif kemanusiaan di Sulteng pada 28 september 2018, sepanjang berjalannya waktu mereka menjelaskan telah banyak melakukan pendampingan beberapa daerah yang diantaranya daerah kabupaten Sigi, kabupaten Donggala dan kota Palu pada masa tanggap darurat dengan melakukan aksi bagi-bagi bantuan, ungkapan dari Lembaga non pemerintah atau Muhammadiyah Disaster Management Center dan Celebes Bergerak menjadi alasan penting bahwa kesamaan tujuan dalam menangani tanggap darurat gempa dan tsunami yang terjadi pada 28 september 2018 lalu, informasi kesamaan tujuan

organisasi diperkuat oleh Manajer Operasional Jamkrindo Cabang Palu, Chandra Aditya Astina, dia mengatakan bahwa Jamkrindo sebuah perusahaan BUMN yang memiliki dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam program Bisnis Continue Management (BCM), aktifitasnya selain memiliki CSR, juga membuka Open Donation di lingkup internalnya, melalui pengumpulan donasi dari seluruh kantor cabang yang ada di Indonesia, setelah donasi terkumpulkan dan dibelanjakan dalam bentuk barang kemudian dikirimkan ke Palu, selain bantuan berupa barang, Jamkrindo juga mengirimkan tim relawannya yang sudah diberi pelatihan terlebih dahulu, dana *Corporate Social Responsibility* mereka dengan ketentuan diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti korban bencana alam.

Deliberasi, Delibrasi terbentuk dengan adanya diskusi bersama, keterbukaan berpendapat, menyatakan ketidak setujuan, diskresi, sehingga membentuk kualitas deliberasi, terpahami bahwa kualitas deliberasi menjadi penentu sejauh mana prinsip bersama terbangun, oleh karena itu, artikel ini menjelaskan sejauh mana diskusi bersama terbangun, apakah actor mendapat kesempatan dalam mengemukakan pendapat, kondisi darurat yang menyebabkan terganggunya komunikasi tidak terelakkan sesaat pasca bencana terjadi, sehingga pada awal masa tanggap darurat, Delibrasi belum tampak, dikarenakan gempa dan tsunami merupakan sebuah insiden yang tidak diketahui kapan datangnya serta tidak adanya sebuah dokumen rencana kontinjensi yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan penanggulangan yang dibuat pada masa prabencana, namun Delibrasi serta Determinasi itu tetap hadir khususnya pada ketika dibentuknya klaster pengungsi dan perlindungan pada 15 Oktober 2018 di kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi tengah, pengambilan keputusan Bersama dalam klaster dijelaskan Staff Database dan Kampanye Celebes Bergerak Aprianto Mangewa, dia menjelaskan bahwa, seluruh lembaga itu di surati oleh dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan ada juga melalui lobi untuk membentuk Klaster Pengungsi dan Perlindungan untuk menyamakan persepsi terkait penanganan kedaruratan.

Determinasi, determinasi, adalah serangkaian keputusan bersama tentang tujuan bersama, keputusan dapat dinyatakan dalam dua cara: primer dan substantif, determinatif primer difokuskan pada keputusan prosedural (teknik kolaboratif, penetapan agenda, perencanaan pertemuan, kelompok kerja), sedangkan keputusan substantif difokuskan pada pembangunan konsensus. Rekomendasi akhir bersama, keputusan mengenai tindakan bersama di masa depan akan diambil sebagai hasil pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk bekerja sama, membentuk klaster dan mengajak semua pihak untuk bekerja sama, melalui diskusi dalam pertemuan klaster. Penerapan manajemen krisis gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi dijelaskan keberadaannya. Keputusan tersebut dijelaskan oleh Yokki Asmoro, Koordinator Program Nasional Pusat Penanggulangan Bencana Muhammadiyah. Dijelaskannya, pertemuan klaster tersebut membahas tugas pokok dan fungsi masing-masing aktor dan mengelompokkannya ke dalam sub-sub klaster. Setiap subcluster memiliki forumnya sendiri, dalam forum ini, kami akan melaporkan kegiatan respons apa saja yang dilakukan di lapangan dan apa saja yang diperlukan.

3. Motivasi Bersama sebagai penyangga yang kuat dalam pertolongan bencana

Selain prinsip-prinsip umum sebagai tolok ukur hadirnya pemerintah yang kooperatif dalam menangani bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Donggala, aspek motivasi bersama juga menjadi bagian penting dalam menghadapi bencana khususnya pada masa tanggap darurat, menjadi Motivasi umum yang muncul di Kabupaten Donggala adalah siklus penguatan yang terdiri dari unsur saling percaya,

pengertian, legitimasi internal, dan komitmen. Bencana alam yang mengejutkan ini menjadi alasan bagi collaborative governance dalam menghadapinya, terutama pada masa tanggap darurat yang merupakan masa kritis segera setelah terjadinya bencana besar.

Kepercayaan bersama, Jika kehadiran merupakan suatu keharusan untuk memastikan adanya motivasi bersama dalam tanggap bencana pada masa tanggap darurat, maka ada tidaknya rasa saling percaya diverifikasi dengan menilai tingkat upaya berkelanjutan dari interaksi timbal balik, pemahaman adalah untuk menunjukkan kepercayaan, dan untuk memahami saling ketergantungan, hubungan antar aktor selain kolaborasi, dan pengalaman bekerja dengan aktor lain, yaitu apakah hal ini menciptakan kepercayaan atau dapat berdampak negatif, Kami mempertimbangkan berbagai pengaruh, seperti ada atau tidaknya, budaya aktor, dan kehadiran aktor, Individu Apakah terdapat peran lain bagi individu yang mempengaruhi hubungan antar aktor atau hubungan saling percaya dengan aktor lain.

Satu hal penting difahami bahwa penanganan gempa dan tsunami di kabupaten Donggala diketahui tidak memiliki rencana kontinjensi, sebagai gambaran awal *collaborative*, namun patut disyukuri bahwa dengan semangat kemanusiaan tentu itu bukan halangan bagi actor yang terlibat, hal yang sama pada kasus Motivasi Muhammadiyah Disaster Management Center dalam menangani gempa dan tsunami di Donggala, sebagaimana yang disampaikan National Program Coordinator Muhammadiyah Disaster Management Center, Yocki Asmoro, dia mengatakan bahwa bencana menjadi urusan bersama dari instansi pemerintah dan NGO atau Lembaga Kemanusiaan yang memiliki kapasitas untuk melakukan respon bersama, cakupan masyarakat yang terdampak sangat luas sehingga tidak mungkin hanya dilakukan sebuah Instansi Pemerintah atau satu NGO saja, kondisi ini mengharuskan untuk berkerjasama antara Instansi Pemerintah maupun NGO dalam melakukan respon kemanusiaan, menangani bencana alam itu menjadi tanggungjawab Bersama.

Sebagai upaya untuk terlaksananya *collaborative* yang baik, saling percaya menjadi hal penting bagi seluruh actor yang berkerjasama, dalam membangun sebuah kepercayaan antar actor dalam penanganan bencana gempa dan tsunami di kabupaten donggala Staff Database dan Kampanye Celebes Bergerak, Aprianto menjelaskan bahwa seluruh komponen yang terlibat dalam melakukan tindakan penanganan bencana alam di Sulawesi Tengah, semua punya basis kerja kemanusiaan, masing-masing lembaga itu memiliki prinsip tersendiri menangani bencana, bukan hal yang mudah untuk membangun kepercayaan kepada seluruh komponen yang terlibat dengan waktu secepat itu, namun kepercayaan itu terbangun melalui adanya hubungan antarpersonal individu dan organisasi, sehingga kerjasama terjadi, itu menunjukkan bahwa bahwa berkerjasama pada masa tanggap darurat itu sangat susah dikarenakan tidak adanya Rencana Kontinjensi gempa bumi dan tsunami yang mempertemukan Lembaga non pemerintah dan sector swasta yang di wadahi pemerintah pada masa prabencana, namun, ada juga dari pihak sector swasta yang langsung percaya tanpa membangun kepercayaan terlebih dahulu, seperti Jamkrindo yang percaya kepada pemerintah untuk berkerjasama.

Chandra Aditya Astina selaku Manajer Operasional Jamkrindo Cabang Palu, mengatakan bahwa bantuan dalam bentuk barang dan relawan yang kami kirimkan masuk dulu di Kota Palu tepatnya di Korem 132 Tadulako sebagai posko koordinasi Provinsi, kita berkerjasama dengan pemerintah dalam hal mempercayakan mereka mendistribusikan bantuan yang kami kirimkan serta menempatkan Relawan kami untuk aks, Itu merupakan tindakan yang bersifat multipurpose, maksudnya sector swasta memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mempergunakan bantuan mereka

sesuai keinginan Pemerintah yang penting sampai kepada penerima manfaat atau korban yang terdampak, ini membuktikan Jamkrindo percaya kepada Pemerintah, namun, bantuan yang mereka kirimkan itu tidak langsung masuk ke BPBD Donggala melainkan masuk ke Posko Korem 132 Tadulako, Sektor Swasta lain terlibat hanya memberikan bantuannya kepada Pemerintah atau melalui Lembaga non pemerintah yang menyalurkannya, sebagaimana yang disampaikan Yocki Asmoro selaku National Program Coordinator Muhammadiyah Disaster Management Center, dia mengatakan bahwa sektor-sektor swasta mereka biasanya akan nempel di NGO, karena sektor swasta memiliki sumberdaya dalam aspek financial tetapi mereka tidak memiliki sumberdaya untuk implementasi di lapangan sebagai distributor., sehingga kebanyakan mereka mendistribusikan bantuannya ke NGO-NGO atau langsung ke posko milik pemerintah.

Pemahaman bersama; hal ini berarti bahwa para aktor saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada, bahwa saling pengertian mengarah pada kualitas interaksi interpersonal antara individu dan organisasi, dan terbentuknya saling pengertian seringkali dipupuk melalui kolaborasi, pengaruh kepercayaan dan rasa saling pengertian. Perbedaan dan perpecahan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam bantuan bencana gempa dan tsunami di wilayah Donggala, rasa saling memahami itu terbentuk dengan adanya rasa saling percaya dalam kolaborasi, saling memahami dapat dipahami dari apa yang disampaikan Ir. Muh. Mursid Sanduan selaku Sekertaris BPBD Kabupaten Donggala mengatakan bahwa, itu menyediakan tempat pengungsian berserta kebutuhan fisik maupun nonfisiknya, Lembaga kemanusiaan datang koordinasi ke kita dan kita arahkan ke tempat pengungsian yang tersedia, mereka datang di tempat pengungsian untuk melaksanakan programnya. Adapun kebutuhan fisik dan nonfisik yang kami salurkan tidak mencukupi kebutuhan pengungsi maka Lembaga Kemanusiaan yang masuk itu menutupi kekurangan tersebut, penjelasan ini menunjukkan bahwa BPBD dan lembaga non pemerintah lainnya itu saling mengerti apa masing-masing yang menjadi kekurangan mereka dalam memulihkan pengungsi.

Legitimasi internal, Wawasan yang muncul dari kolaborasi internal adalah bahwa aktor-aktor yang berkolaborasi dapat dipercaya atau diandalkan dalam menjalankan tugas dan perannya, Karena legitimasi internal, pemahaman bersama, dan rasa saling percaya adalah tiga elemen yang berkaitan erat dalam faktor motivasi umum, faktor-faktor ini juga dapat mempengaruhi kualitas ketiga faktor ini pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, legitimasi internal merupakan adanya pengakuan dari pada tubuh *collaborative* terhadap actor yang dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan perannya, untuk menghadirkan kepercayaan dari actor lain, Muhammadiyah Disaster Management Center punya cara tersendiri sebagaimana dikatakan Bapak Yocki Asmoro, kita memiliki akses untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau respon-respon di beberapa tempat, dan ketika kita sudah melakukan respon di beberapa titik dengan baik dan komitmen dengan apa yang ingin dilaksanakan kemudian dilihat oleh pemerintah. Penanganan tanggap darurat sudah selesai dan lanjut ke masa pemulihan dan kita menyampaikan ke pemerintah menangani program-program pemulihan dan pastinya pemerintah menerimanya, itu menjelaskan tentang sebuah cara agar dapat dipercaya untuk melakukan tindakan kolaborasi ke depan atau jangka panjang, maka yang perlu dilakukan menjaga kualitas kerja dan komitmen dalam pelaksanaannya.

4. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama di Tengah Kondisi Darurat Bencana

Penjelasan panjang sebelumnya memberikan pengasan pentingnya Prinsip Bersama dan Motivasi Bersama sebagai ukuran untuk melihat adanya *Collaborative Government* dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di kabupaten Donggala

khususnya di masa tanggap darurat, namun satu hal penting tidak terlupakan yang dapat dijadikan sebagai ukuran dalam melihat adanya *Collaborative Government* yaitu Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama, sementara untuk memahami itu, Sejauh mana elemen lintas fungsi dari berbagai aktor menghasilkan tindakan yang efektif, sejauh mana setiap aktor yang terlibat memiliki kemampuan unik, dan kemampuan untuk melakukan tindakan kolektif dapat dipahami melalui prosedur dan kesepakatan, dan kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya.

Prosedur dan perjanjian menentukan sejauh mana kerja sama mencakup aturan umum, protokol kegiatan, dan aturan pengambilan keputusan, semua ini dapat dilaksanakan melalui perjanjian informal dan formal, namun, kerja sama yang kompleks dan berjangka panjang memerlukan kesepakatan yang lebih konkrit, termasuk penciptaan landasan hukum kerja sama, artikel ini menunjukkan bahwa masih belum ada konsensus umum mengenai kegiatan penanggulangan gempa dan tsunami di Donggara pada awal masa tanggap darurat berupa aturan protokol kegiatan, dan aturan pengambilan keputusan formal digunakan, kondisi itu terjadi dikarenakan pada prabencana tidak ada penyusunan dokumen rencana kontinjensi yang berisikan program-program penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami sehingga aturan yang digunakan bersifat umum, rencana kontinjensi dalam penanganan bencana, begitu penting dihadirkan, Ir Muh Mursid Sanduan, menjelaskan bahwa pada penyusunan renkon itu melibatkan semua pihak baik dari lintas sector pemerintah daerah, sector swasta dan Lembaga non pemerintah yang membahas suatu strategi hingga pembagian tugas dalam penanganan bencana alam dengan cara kolaborasi, jadi ketika terjadinya bencana alam semua yang terlibat itu terorganisir sebab telah mengetahui tugasnya masing-masing.

Prosedur dan kesepakatan bersama dalam kerja sama diperlukan untuk menciptakan ketertiban bagi semua pihak yang terlibat, Prosedur dan kesepakatan tersebut meliputi aturan umum, protokol operasional dan aturan pengambilan keputusan, yang seluruhnya dilaksanakan melalui kesepakatan informal dan non formal, pada saat penanganan tanggap darurat gempa dan tsunami di Distrik Dongara akan dilaksanakan, belum menggunakan prosedur dan kesepakatan bersama yang bersifat formal melainkan koordinasi antar actor, Yocki Asmoro selaku National Program Coordinator Muhammadiyah Disaster Management Center menjelaskan bahwa, pada saat tanggap darurat, join respon dalam pendistribusian bantuan yang sifatnya cepat dan relative itu belum menggunakan prosedur atau kesepakatan bersama dalam bentuk formal melainkan dengan menggunakan koordinasi-koordinasi yang sifatnya informal karena prinsip bantuan pada saat tanggap darurat memberikan penanganan yang cepat dan khusus, satu-satunya prosedur yang digunakan adalah peraturan kepala BNPB nomor 3 tahun 2016 tentang komando penanganan darurat bencana, Ir. Muh. Mursid Sanduan selaku Sekertaris BPBD Kabupaten Donggala menjelaskan bahwa pada masa tanggap darurat itu, aturan pelaksanaan kolaborasi yang kita gunakan mengikuti prosedur regulasi yang diatur dalam Peraturan Kepala BNPB seperti Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 Tentang system komando penanganan darurat bencana.

Kepemimpinan: Sejauh mana pemimpin kolaboratif hadir dalam praktik, pihak-pihak yang mereka dukung kolaborasi, pemrakarsa pertemuan, moderator dan fasilitator, perwakilan lintas aktor dan kolaborasi, distributor pengetahuan, fasilitator penggunaan alat, dan lain-lain, bagian kerjasama teknis dan ekspresi kepentingan publik, komandan penanggulangan gempa dan tsunami yaitu Sekertaris Daerah karena sesuai pangkatnya dan kapasitasnya melakukan koordinasi lintas sector pemerintah daerah dengan Lembaga non pemerintah dan sector swasta dalam klaster, klaster itu terbentuk di Provinsi dan di

awasi Pemerintah Pusat dan semua pemerintah kabupaten, Lembaga non pemerintah dan sector swasta terkumpul di Provinsi, kemampuan Sekertaris Daerah sebagai Komandan penanggulangan bencana di Kabupaten Donggala berkoordinasi dengan seluruh actor dalam Klaster dengan cara menyampaikan situasi yang ada di kabupaten Donggala dan apa yang dibutuhkan, hasil dari penyampaian dalam klaster itulah menarik perhatian seluruh actor untuk masuk menangani korban di Kabupaten Donggala. Dalam kolaborasi, pemimpin diketahui sangat penting kehadirannya, karena dengan posisinya memiliki peran sangat penting sebagai komandan dalam melakukan penanganan korban gempa bumi dan tsunami di kabupaten Donggala, Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Donggala Ir Muh Mursid Sanduan mengatakan sebagai Komandan penanggulangan tanggap darurat gempa dan tsunami di Donggala yaitu Sekertaris Daerah dan sebagai kepala pelaksana itu dari BPBD sesuai dengan Undang Undang no 24 tentang penanggulangan bencana 2007, sekertaris Kabupaten itu sebagai kepala badan ex officio, sesuai dengan pangkat dan kapasitasnya untuk mengkoordinir semua, memang posisi-posisi itu semua sangat penting dan yang memimpin itu juga sangat penting.

Pengetahuan; sejauh mana artis memerlukan informasi untuk terlibat dalam proses kolaborasi, sejauh mana artis menemukan informasi dalam pertemuan bersama, sejauh mana aktor menggunakan pertemuan bersama untuk mengomunikasikan hasil pencapaian masing-masing aktor, dan sejauh mana dimana karakter di layar memeriksa dan membuat pilihan bersama menjadi informasi yang sangat penting dan vital. Dalam kolaborasi, pengetahuan yang dimaksud adalah data-data yang harus diikutsertakan oleh tokoh-tokoh di layar dalam persiapan kolaborasi, yang meliputi data-data seputar pertemuan dan metodologi penanganan, serta data dari keadaan yang terjadi di lapangan, Peraturan Donggala Muh. Mursid Sanduan memahami bahwa pada umumnya sulit bagi pemerintah kita untuk memutuskan apakah mereka memiliki data atau berkonsentrasi pada bencana. Upaya yang kami lakukan untuk memperoleh data adalah dengan mengundang beberapa Organisasi Akomodatif yang bekerja disini untuk berdiskusi dan beberapa kali tanpa kami sendiri yang mengundangnya. yang datang kepada kami untuk berdiskusi. Biasanya mereka melaporkan pencapaian pekerjaan mereka atau kita menanyakan apa yang telah dilaksanakan dan apa lagi yang akan dilakukan dan apa yang mereka butuhkan, sehingga dalam upaya bersama, data sangat penting dan diperlukan, Bencana Lingkungan Pengurus Organisasi mengetahui hampir kekurangan mereka. Oleh karena itu mereka berupaya menggali data dengan cara berunding dengan lembaga-lembaga non-administratif yang mempunyai pemahaman dalam penanganan bencana, selain itu data juga diperoleh melalui koordinasi yang dilakukan oleh Direktur Gempa dan Gelombang Pasang para penyelenggara di Pemerintahan Donggala dengan seluruh bagian-bagian yang merupakan anggota kelompok tersebut, belum tentu BPBD yang memerlukan informasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan, namun lembaga-lembaga non-administratif juga memerlukan data masing-masing pihak..

Manajer Keuangan Celebes bergerak, Firmansyah mengatakan bahwa karena hampir semua lembaga besar yang akrab dengan penanggulangan bencana ada dalam cluster, informasi untuk memetakan sebaran lembaga lain dengan sejarah panjang kegiatan dan bidang dukungannya saya jelaskan setelah Anda memilikinya, anda harus bergabung dengan cluster dalam penanggulangan bencana, bencana alam yang terjadi di Aceh, Jogja, dan beberapa bencana alam lainnya di Indonesia maupun internasional telah membuktikan bahwa mereka memiliki unsur pengetahuan, logistik, finansial, dan teknis bencana lebih jauh lagi, semua unsur yang menjadi bagiannya menjelaskan perlunya pengetahuan sebelum memberikan bantuan dalam daerah yang terkena dampak, klaster

sudah mempunyai wilayah dukungannya masing-masing dan ini merupakan keputusan yang tidak dapat dibantah, sehingga memaksa semua lembaga swadaya masyarakat untuk bergabung dengan klaster yang ada.

Sumber Daya, sejauh mana dukungan finansial, sejauh mana waktu dan alokasi peran, sejauh mana dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan, sejauh mana saling mendukung, sejauh mana diperlukannya ahli analisis bersama, dan sejauh mana pelaksanaannya di lapangan serta kebutuhan ahli, sumberdaya merupakan factor penunjang dalam kolaborasi, untuk memenuhi kebutuhan dasar korban, tentunya setiap actor yang terlibat memiliki pendanaan finansialnya, financial yang dimiliki actor pada masa tanggap darurat kebanyakan dalam bentuk barang dan logistic, poin penting dalam sumberdaya pada kapasitas melakukan tindakan bersama yaitu saling melakukan pendampingan, Jika ada sebuah lembaga non pemerintah yang menyalurkan bantuan ke wilayah dampingan lembaga non pemerintah lainnya maka dilakukan technical assistant, National Program Coordinator Muhammadiyah Disaster Management Center, Yocki Asmoro menjelaskan bahwa kerjasama Lintas sector NGO, jika ada sebuah NGO yang melakukan pendistribusian ke suatu tempat yang menjadi dampingan NGO lain, maka dilakukannya technical assistant yang bertugas untuk mendampingi dan memastikan bahwasanya bantuan yang di distribusikan di wilayah terdampak secara prosedur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan, semua lembaga non pemerintah yang terlibat dalam klaster memiliki daerah dampingan masing-masing, namun, untuk memenuhi kebutuhan korban, tidak semua lembaga non pemerintah itu memiliki segalanya yang dibutuhkan korban, tentunya ada kerjasama lintas sector lembaga non pemerintah.

KESIMPULAN

Penelitian yang melihat dinamika *collaborative governance* dalam penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami 28 september 2018 di kabupaten Donggala pada masa tanggap darurat yang dilakukan oleh tiga pilar *stakeholder* yaitu pemerintah, lembaga non pemerintah dan sector swasta, dengan menggunakan tiga aspek konsep teori Emerson, Nabatchi & Balogh (2011) yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan kapasitas melakukan tindakan bersama menunjukkan bahwa:

Pada penggerakan prinsip Bersama menunjukkan aspek kemanusiaan menjadi penentu keterlibatan segenap komponen dalam penanganan bencana, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Sulteng Bergerak mengklaim aspek kemanusiaan itu sebagai alasan mereka terlibat, termasuk PT. Jamkrindo, atas dasar kemanusiaan itu juga mereka bergerak tidak menunggu lama setelah bencana terjadi secara bersamaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala sebagai pemegang tanggungjawab dalam menanggulangi bencana membuka ruang kerjasama yang kuat dalam penanganan bencana. *Motivasi Bersama*, dalam penanganan bencana yang terjadi di kabupaten Donggala, kolaborasi yang kuat antar segenap pemangku kepentingan dijadikan sebagai penyangga untuk memastikan semua masalah terselesaikan dengan baik, karena begitu banyaknya urusan mendesak yang harus diselesaikan ditambah lagi dengan luasnya cakupan wilayah terdampak menjadi alasan pentingnya kolaborasi yang kuat dihadirkan dalam penanganan bencana, satu hal yang mengembirakan pasalnya begitu banyak komponen yang tergerak untuk ikut serta dalam penanganan bencana atas dasar nilai kemanusiaan menjadikan bencana menjadi urusan bersama, kolaborasi terbangun melalui hubungan interpersonal individu maupun

kelompok. *Kapasitas melakukan tindakan bersama*, aspek financial yang dimiliki segenap pemangku kepentingan mendorong terbentuknya kolaborasi yang kuat dalam menangani tanggap darurat gempa bumi dan tsunami di Donggala, hubungan interpersonal antar individu atau kelompok dalam menggali pengetahuan menjadikan proses pendistribusian bantuan yang sifatnya cepat dan tepat sampai kepada para penerima manfaat. Temuan pada *collaborative governance* dalam menangani bencana alam gempa bumi dan tsunami di kabupaten Donggala ini tanpa di dasari rencana kontijensi sebagai pedoman berkerjasama dalam menangani bencana alam tersebut, dalam penanganan bencana alam, rencana kontinjensi itu sangat dibutuhkan, sebab pada penyusunannya melibatkan semua pihak baik pada jajaran pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi, sector swasta dan media itu tergabung di dalamnya yang menjadikan bencana alam itu menjadi tanggungjawab bersama, hal ini sejalan dengan studi collaborative governance menurut Ansell and Gash (2007) yang melibatkan para pemangku kepentingan *Stakeholders non-state* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi *consensus*, delibratif dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan *consensus public*, mengelola program public atau aset public. (Ansell and Gash, 2007).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Asrifai, A. (n.d.). *DYNAMICS COLLABORATIVE GOVERNANCE IN HANDLING POST DISASTER CENTRAL PALU SULAWESI CITY*.
- Booher, D. E., & Innes, J. E. (2002). Network power in collaborative planning. *Journal of Planning Education and Research*, 21(3), 221–236.
- Charalabidis, Y., & Loukis, E. (2012). Participative public policy making through multiple social media platforms utilization. *International Journal of Electronic Government Research (IJEGR)*, 8(3), 78–97.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM press.
- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 47–53.
- Hermon, D. (2015). *Geografi bencana alam*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Kooiman, J. (2002). Governing as governance. *Governing as Governance*, 1–264.
- Masyhuri, A., Purnaweni, H., Herawati, A. R., & Priyadi, B. P. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 854–862.
- Miles, Matheaw B, dan Huberman A. Michael. (2014). Terjemahan tjetjep Rohendi. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, L. J. (1989). Metodologi penelitian kualitatif. (No Title).
- Mukhtar, P. D., & Pd, M. (2013). Metode praktis penelitian deskriptif kualitatif. *Jakarta: GP Press Group*.

- Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative governance dalam penanganan rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 82–98.
- Nazir, M. (2005). Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Nasional, P. G. (2018, September 2018). *Gempabumi Tektonik M=7.7 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada hari Jumat, 28 September 2018, Berpotensi Tsunami*. Retrieved Desember 26, 2021
- O’Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?* Anu Press.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Seigler, D. (2011). *Renewing Democracy by Engaging Citizens in Shared Governance*. JSTOR.
- Sinambela, M., Hasibuan, A., Makbul, R., Armus, R., Marlyono, S. G., Simarmata, M. M., Kuswanto, K., Fatmayanti, A., Manalu, V., & Bachtiar, E. (2021). *Mitigasi dan Manajemen Bencana*. Yayasan Kita Menulis.
- Sørensen, E., & Triantafillou, P. (2016). *The politics of self-governance*. Routledge.
- Stoker, G. (1998). Governance as theory: Five propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17–28.
- Sukmadinata. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Graha
- Ulum, M. C. (2014). *Manajemen bencana: Suatu pengantar pendekatan proaktif*. Universitas Brawijaya Press.
- Wanna, J. O. (2008). Collaborative Governance A new era of public police Australia? (p.3). Canberra, Australia: ANU E Press.
- Wiarto, G. (2017). Tanggap darurat bencana alam. *Yogyakarta: Gosyen Publishing*.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana
- Peraturan Dearah Kabupaten Donggala Nomor Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah
- BPBD. (2019). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala. Diambil 26 Januari 2023.
- BPS. (2022). Kabupaten Donggala Dalam Angka. Katalog BPS 1102001.7205 Diakses pada 8 Februari 2022, diakses dari <https://donggalakab.bps.co.id>